

Pengaruh Asimetri Informasi, Budaya Organisasi dan Implementasi *Good Governance* terhadap Kecurangan Akuntansi

Muhammad Fazli^{1*}, Vince Ratnawati², Azwir Nasir³

^{1,2,3}Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau
¹muhammadfazli178@gmail.com, ²vince.ratnawati@lecturer.unri.ac.id,
³azwir.nasir@lecturer.unri.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 3 Desember 2022
Disetujui : 19 Desember 2022
Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Information Asymmetry, Organizational Culture, Implementation of Good Governance on the dependent variable of Accounting Fraud with Internal Control as a moderating variable. The population in this study was 46 OPD in Bengkalis Regency and the number of samples studied were 46 OPD in Bengkalis Regency with a total of 138 people. The data source is the primary data from the questionnaire. Variables are measured with a 5 point Likert scale. The data collection method is Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) using WarpPLS software version 5.0. The results show that Information Asymmetry has a positive effect on Accounting Fraud, Organizational Culture and Implementation of Good Governance have a negative effect on Accounting Fraud, Internal Control weakens the positive effect of Information Asymmetry on Accounting Fraud, and Internal Control strengthens the influence of Organizational Culture and implementation of Good Governance on Accounting Fraud. The implementation of Good Governance directly has a negative effect on fraud, with the existence of a negative influence between the implementation of Good Governance on fraud, the implementation of internal control is able to strengthen the level of negative influence between the implementation of Good Governance on fraudulent acts that occur.

Keywords: *Accounting Fraud; Information Asymmetry; Implementation of Good Governance; Internal Control; Organizational Culture*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki perwujudan *Good Governance* dan tuntutan yang semakin meningkat dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan (Purwanti, 2022; Rahman et al., 2022; Safkaur et al., 2019). Implementasi *good governance* tidak dapat dipisahkan oleh adanya sistem pengendalian dari setiap instansi pemerintah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban secara efisien, efektif dan terkendali (Shonhadji & Maulidi, 2020). Hal ini demi mewujudkan sektor pemerintah yang dapat dipercaya sehingga tidak adanya kasus kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian negara (Palangda & Dame, 2020; Roszkowska, 2020). Dengan demikian dapat tercapai tujuan bernegara dan pemerintahan yang berfungsi secara ideal.

Organisasi sektor publik sangat identik dengan organisasi pemerintahan yang kegiatannya berdasarkan kepentingan masyarakat. Pemerintah selayaknya senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tetapi fakta yang terjadi di lapangan jauh dari kenyataan (R. C. Dewi & Suparno, 2022; Dwiyanto, 2021). Hal ini terlihat dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah tetapi tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sandiasa & Agustana, 2018; Teja, 2015). Salah satu penyebab yang

menjadikan tidak maksimalnya pelayanan publik kepada masyarakat adalah karena adanya praktek yang merugikan negara seperti penyimpangan secara tidak langsung dapat membuat masyarakat menjadi dirugikan (Ashok et al., 2021) dan penyimpangan itu sering terjadi dalam bentuk kecurangan. Menurut Lukman & Harun (2018), kecurangan sebagai sebuah istilah sesuatu yang tidak benar, yang artinya untuk memperoleh keuntungan dengan kepentingan tujuan pribadi ataupun organisasi. Konsep yang membahas terkait motivasi seseorang adalah teori *fraud triangle* yang diuraikan dalam SAS 99 (AU316), teori *fraud* seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap (*rasionalisasi*) (Siddiq & Hadinata, 2016). (Siddiq & Hadinata, 2016)

Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi yaitu kecurangan akuntansi (Hashim et al., 2020; Young, 2020). Teori kecurangan dalam konsep akuntansi merupakan bagian prosedur kecurangan akuntansi, kecurangan akuntansi diartikan bagian laporan keuangan yang disengaja dilaporkan secara curang dan penyalahgunaan (Liao et al., 2019; Ramos Montesdeoca et al., 2019). Kecurangan akuntansi terjadi karena adanya ancaman serius bagi pemangku kepentingan yang dilihat dari peningkatan kejahatan ekonomi. Kecurangan akuntansi dapat menimbulkan adanya kerugian dalam dunia pekerjaan dan kerugian ini menjadi masalah serius yang perlu ditindaklanjuti (Arifin, 2020; Mangala & Kumari, 2017).

Di Indonesia sering terjadi kasus tindakan yang sengaja informasinya yang benar disembunyikan dan memanipulasi laporan keuangan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan yang tidak benar terkait akuntansi yang ada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Salah satu bentuk kasus kecurangan akuntansi yang terjadi diantaranya adanya temuan penyelewengan dana perjalanan dinas fiktif di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh KPA, KPA, PPTK, dan Bendahara di Dispenda Bengkalis. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa telah melakukan kegiatan SPPD fiktif tersebut pada tahun 2012 dan 2013. Hasil pemeriksaan (BPKP) Riau, tindakan terdakwa merugikan negara sebesar Rp290 juta.

Selain kasus perjalanan dinas fiktif, pada tahun 2017 terjadi tindakan manipuatif dan pemalsuan dokumen perjalanan dinas di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kasus temuan ini berawal dari laporan hasil pemeriksaan (LPH) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam penyusunan laporan keuangan terdapat temuan realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan diantaranya harga tiket penerbangan yang tidak sesuai dengan dengan harga tiket yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.76.696.686,00.

Kecurangan akuntansi tidak mampu terlepas dari adanya teori agensi yang dapat dijelaskan dengan hubungan antara pemerintah (agent) dengan pihak pemberi amanah sebagai pengguna (Heald, 2018). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat(prinsipal) dan biasanya kepentingan yang berbeda di dalam pemerintahan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai keinginan yang dikehendaki. Permasalahan ini mampu berdampak pada manipulasi data yang dilakukan untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki (Ramadhany, 2017). Permasalahan tersebut timbul karena adanya kesenjangan informasi yang terjadi dikarenakan kedua belah pihak pemerintahan tidak memiliki informasi yang sama dalam menentukan kontribusi terkait adanya prospek kerja pemerintahan terhadap evaluasi instansi yang sebenarnya (SELA, 2021; Zhang & Xu, 2021).

Malau & Parhusip (2015) mengungkapkan bahwa asimetri informasi adalah kondisi dimana perolehan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif. Asimetri informasi juga merupakan faktor penting yang menyebabkan seseorang bertindak curang. Bila terjadi asimetri informasi, seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tentunya, hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku principal. Semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi didalam sektor publik maka akan mampu meningkatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang merugikan negara.

Kecurangan adalah bagian dari perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja dengan penyalahgunaan yang salah seperti sumber daya perusahaan yang dipentingkan untuk kepentingan sendiri dan menyampaikan informasi dengan tidak benar dalam menutupi penyalahgunaan itu (Manurung & Hardika, 2015). Sehingga informasi yang tidak benar dapat

timbul dikarenakan budaya pada organisasi yang tidak baik. Karena budaya organisasi adalah bagian pemikiran yang dibelajarkan kepada personel untuk dapat berpikir, bertindak dengan benar. Budaya organisasi diciptakan sesuai individu, etika organisasi dan hak kepegawaian yang ditujukan kepada pegawai dan struktur organisasi. Budaya organisasi juga membentuk dan mengendalikan perilaku dalam keorganisasian (Putra & Latrini, 2018). Budaya organisasi diartikan dengan bagaimana cara seseorang merespons dan menafsirkan situasi yang dalam permasalahan tersebut. Begitupula dengan melakukan Tindakan kecurangan, apabila individu didalam organisasi dapat menafsirkan segala situasi dan permasalahan dengan baik maka akan mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam bekerja (Tutu, 2022).

Implementasi *good governace* yang merupakan bagian faktor untuk mempengaruhi tindakan informasi yang tidak benar di lingkungan pemerintah, sehingga teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, sebelum itu dilakukan terlebih dahulu desentralisasi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat (Mohammad, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dijamin dapat diwujudkan dalam *good local governance*, dikarenakan pelaksanaan otonomi daerah tersebut diarahkan ke politik dan moral seseorang. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat diandalkan dalam pewujudan *good local governance*. Apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat pada instansi pemerintah daerah yang mampu menurunkan tindakan kecurangan (Jafar, 2019).

Dari penjelasan diatas terdapat faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara langsung dalam meningkatkan ataupun menurunkan kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintah. Namun, diantara faktor-faktor tersebut terdapat satu faktor lainnya yang mampu memperkuat ataupun memperlemah kasus kecurangan akuntansi yang terjadi. Sistem pengendalian internal mempunyai peran penting dalam mengurangi kecurangan. Sistem ini efektif untuk menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis dalam kecenderungan dalam berlaku curang dalam hal akuntansi (Adi et al., 2016). Tanpa adanya sistem ini juga didalam organisasi, seseorang tidak akan mampu melakukan perilaku yang tidak etis. Sistem ini efektif membantu dalam monitoring hasil (Indriastuti et al., 2017). Semakin meningkatkan pengawasan ataupun monitoring dari dalam akan mampu menjadi sebuah pondasi yang menopang lingkungan organisasi untuk tidak berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Keefektifan sistem pengendalian internal yang baik akan mampu memperkuat hubungan setiap variabel yang mampu menurunkan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal tidak dilakukan dengan baik maka akan mampu memperlemah hubungan setiap variabel yang mampu meningkatkan kecurangan akuntansi (Aswad et al., 2018; Fadhilah et al., 2021).

Hasil-hasil penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian Noviriantini et al., (2015) tentang pengaruh budaya etis organisasi dan moralitas aparat terhadap kecurangan (*Fraud*) akuntansi seperti bahwa budaya organisasi dan moralitas aparat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian lainnya yaitu Arifin (2020), Rowa & Arthana (2019) tentang pengendalian internal kas dan implementasi *Good Governance* terhadap fraud dan menunjukkan bahwa ada pengaruh terhadap fraud. Penelitian Aswad et al., (2018) tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi dengan keefektifan pengendalian internal sebagai variabel moderasi dan keadaan asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi ada pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti kembali terkait kecurangan akuntansi yang terjadi terkhususnya pada pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis. Penulis merasa masih perlu ditelitiberdasarkanfenomena yang terjadi masih tingginya kasus kecurangan akuntansi yang menyebabkan kerugian negara. Sehingga peneliti melakukan pengembangan dan modifikasi dari penelitian sebelumnya dengan menggantikan variabel ketaatan pada aturan akuntansi dan kesesuaian akuntansi menjadi variabel budaya organisasi dan implementasi *Good Governance*. Hal tersebut disesuaikan dengan fenomena yang diungkap dari beberapa tahun lalu di Kabupaten Bengkalis.

STUDI LITERATUR

Teori Keagenan (Agency Theory)

Hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen adalah fokus dari teori keagenan. Dalam hubungan keagenan, salah satu pihak (*principal*) menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. *Agency theory* memberikan pandangan bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi pemegang saham. Hal ini, mereka akan bertindak dengan penuh sadar untuk melakukan kepentingannya diri sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemegang saham seperti yang diasumsikan dalam *stewardship theory* (Wardani & Wulandari, 2022). Teori keagenan bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah keagenan yang timbul antar kerjasama bermitra dengan berbagai tujuan dan pembagian kerja. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan akuntansi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asimetri pengetahuan, budaya organisasi, dan pengendalian intern.

Kecurangan Akuntansi

Kecurangan akuntansi didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja berupa pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva (Aprilyanti, 2021). Kecurangan Akuntansi berkaitan dengan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan dan penyalahgunaan aktiva. Kecurangan Akuntansi merupakan suatu hal yang di sengaja oleh pelakunya dan dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri (Jaswadi et al., 2022) al, 2022).

Asimetris Informasi

Menurut Malau & Parhusip (2015), asimetris informasi merupakan kesenjangan perolehan informasi yang mana masalah tersebut dapat diakibatkan oleh konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Isu-isu ini dapat mempengaruhi apakah penipuan atau manipulasi data digunakan untuk mencapai kemakmuran yang diinginkan. Berdasarkan penelitian Nazarah & Saleh (2021) permasalahan tersebut timbul karena adanya perbedaan perolehan informasi antara pemerintahan dengan masyarakat. Penyebab tingginya tingkat asimetri informasi yang terjadi didalam pemerintahan maka dari itu akan mampu meningkatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang merugikan negara. Penelitian Indriastuti (2016) menunjukkan hasil bahwa asimetri informasi memberikan pengaruh terhadap kecurangan. Sedangkan hasil penelitian Arifin (2020) asimetri informasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

H₁: Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

Budaya organisasi

Dartikan dengan bagaimana cara seseorang merespons dan menafsirkan situasi yang dalam permasalahan tersebut. Begitupula dengan melakukan Tindakan kecurangan, apabila individu didalam organisasi dapat menafsirkan segala situasi dan permasalahan dengan baik maka akan mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam bekerja (Tutu, 2022). Didalam organisasi pemerintahan ketika pegawai melakukan kecurangan tersebut dianggap hal yang biasa, maka pegawai yang lain juga akan cenderung untuk melakukan suatu tindakan kecurangan dikarenakan adanya pembenaran ketika melakukan kecurangan didalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, ketika dalam suatu instansi pemerintahan telah ditanamkan sifat-sifat etis serta kecurangan dianggap perbuatan yang tidak etis, maka pegawai lain akan cenderung untuk tidak melakukan kecurangan. Penelitian Nugraha & Wardhani (2022), Putra & Latrini (2018) memberikan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh secara negatif terhadap kecurangan akuntansi. Budaya etis dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi pola pikir pegawai lain. Sedangkan hasil penelitian dari Adi et al (2016) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan.

H₂: Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

Implementasi Good Governance

Implementasi *good governance* yang merupakan bagian faktor untuk mempengaruhi tindakan informasi yang tidak benar di lingkungan pemerintah, sehingga teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan tentang bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, sebelum itu dilakukan terlebih dahulu desentralisasi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat (Mohammad, 2020). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dijamin dapat diwujudkan dalam *good local governance*, dikarenakan pelaksanaan otonomi daerah tersebut diarahkan ke politik dan moral seseorang. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang dapat diandalkan dalam pewujudan *good local governance* (Edinov et al., 2022). Apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat pada instansi pemerintah daerah yang mampu menurunkan Tindakan kecurangan (Jafar, 2019). Dewi et al (2017) menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* memberikan pengaruh negatif terhadap fraud. Pelaksanaan *Good Governance* yang baik maka dapat membantu mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan tujuan bangsa dan negara (Edinov, 2022). Namun terdapat hasil berbeda yang dilakukan oleh Amalia (2018) yang menyatakan implementasi *Good Governance* tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan, berdasarkan penelitian yang dilakukan implementasi *Good Governance* yang tinggi tidak dapat meminimalisir dan mencegah kecurangan yang terjadi.

H₃: Implementasi Good Governance berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

Pengendalian Internal

Menurut PP 60/2008, pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Hasil penelitian Aswad et al (2018) didapat pengendalian internal memperlemah adanya pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan Firnanda et al (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) dan Rowa & Arthana (2019) menyatakan bahwa Implementasi *Good Governance* secara langsung memberikan pengaruh negatif terhadap fraud.

H₄: Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Asimetri Informasi dengan Kecurangan Akuntansi.

H₅: Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Budaya Organisasi dengan Kecurangan Akuntansi.

H₆: Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Implementasi Good Governance dengan Kecurangan Akuntansi.

METODE

Populasi penelitian ini sebanyak 46 OPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Metode sampel yang digunakan metode sensus (*non probability sample*) & responden tiap OPD sebanyak 3 orang yaitu Kepala OPD, Kasubbag Keuangan, dan staff keuangan. Sehingga diperoleh 138 responden. Sumber data adalah data primer dari kuesioner. Metode analisis data ialah program *WarpPLS* 5.0. Variabel diukur dengan 5 point skala likert. Skala 1 “sangat rendah” & skala 5 “sangat tinggi”. Pengukuran Kecurangan Akuntansi dengan 5 indikator mengacu pada SPSP (2011), Asimetris Informasi diukur dengan 5 indikator mengacu kepada Mustika (2016), Budaya Organisasi diukur dengan 7 indikator mengacu pada Wibowo (2016), Implementasi *Good Governance* diukur dengan 4 indikator mengacu pada Sedarmayanti (2012), Terakhir variabel Pengendalian Internal diukur dengan 5 indikator mengacu PP No. 60 Tahun 2008.

HASIL

Descriptive Statistical Test

Nilai rata-rata semua variabel menunjukkan data cukup baik disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. *Descriptive Statistical Test*

<i>Descriptive Statistics</i>					
Konstruk Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Asimetri Informasi	94	18,00	30,00	24,80	2,878
Budaya Organisasi	94	29,00	63,00	50,19	7,078
Implementasi <i>Good Governance</i>	94	18,00	35,00	27,18	3,816
Pengendalian Internal	94	28,00	60,00	45,73	7,524
Kecurangan Akuntansi	94	9,00	31,00	18,07	4,215
Valid N (listwise)	94				

Sumber: Data Olahan Statistik, 2022

Indicator of Reliability Test

Tabel 2. *Indicator of Reliability Test*

	<i>Composite of Reliability</i>	<i>The Cronbach's Alpha</i>
Asimetri Informasi	0,906	0,875
Budaya Organisasi	0,955	0,949
Implementasi <i>Good Governance</i>	0,925	0,905
Pengendalian Internal	0,953	0,945
Kecurangan Akuntansi	0,927	0,911

Sumber: Data Olahan Statistik, 2022

Ditabel 2 *Cronbach's Alpha* masing-masing indikator lebih > dari 0.7, sehingga dapat dikatakan seluruh variabel sudah *reliable*.

Coefficient of Determination Result

Tabel 3. *Coefficient of Determination Result*

Konstruk Penelitian	R-Squared
Kecurangan Akuntansi	0,790

Sumber: Data Olahan Statistik, 2022

Nilai *R-Squared* Kecurangan Akuntansi pada tabel 3 sebesar 0,790 artinya pengaruh Asimetri Informasi, Budaya Organisasi, Implementasi *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi ialah sebesar 79% sedangkan sisanya yaitu 21% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Hypothesis Test Result

Tabel 4. *Hypothesis Test Result*

Uji Hipotesis	P-value	Path Coef.	Keterangan
H ₁ Asimetri Informasi → Kecurangan Akuntansi	0,266	<0,001	Berpengaruh Positif
H ₂ Budaya Organisasi → Kecurangan Akuntansi	-0,421	<0,001	Berpengaruh Negatif
H ₃ Implementasi <i>Good Governance</i> → Kecurangan Akuntansi	-0,400	<0,001	Berpengaruh Negatif
H ₄ Asimetri Informasi * Pengendalian Internal → Kecurangan Akuntansi	-0,194	0,002	Memperlemah
H ₅ Budaya Organisasi * Pengendalian Internal → Kecurangan Akuntansi	-0,153	0,035	Memperkuat
H ₆ Implementasi <i>Good Governance</i> * Pengendalian Internal → Kecurangan Akuntansi	-0,131	0,041	Memperkuat

Sumber: Data Olahan Statistik, 2022

PEMBAHASAN

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecurangan Akuntansi

Nilai *p-value* sebesar $0.001 \leq 0,05$, maka H_1 **diterima**. Artinya variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi dengan Nilai *path coefficients* sebesar 0,266 pada variabel asimetri informasi menunjukkan bahwa setiap peningkatan asimetri informasi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kecurangan akuntansi sebesar 0,266 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti (2016) dan Muna & Haris (2018) yang menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Hal tersebut semakin besar adanya ketidakselarasan perolehan informasi mengakibatkan pihak agen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan demi memperbaiki reputasi organisasi dan memperoleh kompensasi. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2020) yang memberikan hasil bahwa asimetri informasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Akuntansi

Nilai *p-value* $0.001 \leq 0,05$, maka H_2 **diterima**, artinya variabel budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, dengan peroleh nilai *path coefficients* sebesar -0,421 yang diartikan setiap peningkatan budaya organisasi maka akan menurunkan kecurangan akuntansi sebesar -0,421 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eka Putra & Latrini (2018) dan Rodiah et al (2019) yang menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, budaya etis yang ada di lingkungan instansi sangat mempengaruhi pola pikir dari pegawai satu kepegawai lainnya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi et al (2016) dan Takalamingan (2022) yang menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Pengaruh Implementasi Good Governance terhadap Kecurangan Akuntansi

Nilai *p-value* $0.001 \leq 0,05$, maka H_3 **diterima**, artinya implementasi *Good Governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, dengan peroleh nilai *path coefficients* sebesar -0,400 menjelaskan bahwa setiap peningkatan implementasi *Good Governance*, maka akan menurunkan kecurangan akuntansi sebesar -0,400 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2017) dan Rowa & Arthana (2019) menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* memberikan pengaruh negatif terhadap fraud, semakin tinggi implementasi *Good Governance* maka semakin rendah tingkat fraud. Pelaksanaan *Good Governance* yang baik maka dapat membantu mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2018) yang menyatakan implementasi *Good Governance* tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan karena implementasi *Good Governance* yang tinggi tidak dapat meminimalisir dan mencegah kecurangan yang terjadi.

Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Asimetri Informasi dengan Kecurangan Akuntansi

Nilai *p-value* sebesar $0,002 \leq 0,05$, dengan demikian H_4 **diterima**. Diperoleh nilai *path coefficients* sebesar -0,194 yang artinya setiap peningkatan asimetri informasi yang dimoderasi oleh pengendalian internal, maka akan menurunkan kecurangan akuntansi sebesar -0,194 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aswad et al (2018) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal mampu memperlemah pengaruh positif asimetri informasi terhadap kecurangan.

Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Budaya Organisasi dengan Kecurangan Akuntansi

Nilai *p-value* $-0,035 \leq 0,05$, dengan demikian H_5 **diterima**. Diperoleh nilai *path coefficients* sebesar 0,153 yang artinya setiap peningkatan budaya organisasi yang dimoderasi oleh

pengendalian internal sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan kecurangan akuntansi sebesar 0,153 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firnanda et al (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal mampu memperkuat pengaruh negatif antara budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

Pengendalian Internal dapat memoderasi hubungan antara Implementasi Good Governance dengan Kecurangan Akuntansi

Nilai *p-value* sebesar $0,041 \leq 0,05$, maka H_6 **diterima**. Diperoleh nilai *path coefficients* sebesar -0,131, disetiap peningkatan implementasi *Good Governance* yang dimoderasi oleh pengendalian internal, maka akan menurunkan kecurangan akuntansi sebesar -0,131 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al (2017) dan Rowa & Arthana (2019) menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* secara langsung memberikan pengaruh negatif terhadap fraud, dengan adanya pengaruh negatif antara implementasi *Good Governance* terhadap kecurangan maka dengan adanya penerapan pengendalian internal mampu memperkuat tingkat pengaruh negatif antara implementasi *Good Governance* terhadap tindakan kecurangan yang terjadi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, budaya organisasi dan implementasi *Good Governance* memberikan pengaruh secara negatif kepada kecurangan akuntansi. Selain itu, pengendalian internal mampu memperlemah pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi, namun pengendalian internal memperkuat pengaruh budaya organisasi dan implementasi *Good Governance* terhadap kecurangan akuntansi. Implikasi penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan sebagai bahan masukan bagi akademik maupun penelitian selanjutnya sedangkan Implikasi penelitian ini secara praktis adalah diharapkan organisasi perangkat daerah terutama di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dapat membuat pertimbangan dari hasil penelitian ini, untuk melakukan upaya dalam menanamkan budaya organisasi yang maksimal, diantaranya selalu memberi arahan untuk selalu berinovasi, menjaga stabilitas lingkungan instansi, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, serta menanamkan budaya kepedulian pada hal detail atau teliti. Selain itu, pemerintah untuk dapat menerapkan aturan hukum yang adil dan tidak dekriminatif, lebih transparansi, keterbukaan terhadap masyarakat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Disamping itu, pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan lingkungan pengendalian internal yang efektif melalui penilaian resiko yang maksimal, serta selalu melakukan pemantauan atau pemeriksaan disetiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat pada instansi pemerintah daerah sehingga dapat menurunkan tindakan kecurangan yang terjadi.

REFERENSI

- Adi, Risqi, Ardiyana, Komala, Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10.
- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis faktor-faktor penentu kecurangan (fraud) pada sektor pemerintahan (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10.
- Amalia, R. (2018). *Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Pimpinan, Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Pengendalian Internal, Good Governance, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset D.*

- Aprilyanti, L. (2021). *Pengaruh Skeptisme Profesional Dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud)*. Univeristas Komputer Indonesia.
- Arifin, J. (2020). Determinan Kecurangan Akuntansi Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(2), 187–204. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4035>
- Ashok, M., Al, M. S. M. A. B., Madan, R., & Dzandu, M. D. (2021). How to counter organisational inertia to enable knowledge management practices adoption in public sector organisations. *Journal of Knowledge Management*.
- Aswad, H., Hasan, A., & Indrawati, N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Keefektifan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 221–234.
- Dewi, K. T. K., Wahyuni, M. A., Herawati, N. T., & AK, S. E. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Kas, Implementasi Good Governance, Moralitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Persepsi Kesesuaian Kompensasi terhadap Financial Fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM PRESS.
- Edinov, S. (2022). Does Competence Improve The Factors That Affect Good Governance? *GOVERNORS*, 1(1), 15–23.
- Edinov, S., Taufik, T., Basri, Y. M., Indrawati, N., & DP, E. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance dengan Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3815–3824.
- Eka Putra, I. P. A. P., & Latrini, M. Y. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Moralitas pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di LPD se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p20>
- Fadhilah, N. F., Abdullah, M. W., & Suharto. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Moderating. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 239–252.
- Firnanda, R., Fariz, M., Pangestu, L. P., & Umar, H. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, 2–11.
- Hashim, H. A., Salleh, Z., Shuhaimi, I., & Ismail, N. A. N. (2020). The risk of financial fraud: a management perspective. *Journal of Financial Crime*.
- Heald, D. (2018). Transparency-generated trust: The problematic theorization of public audit. *Financial Accountability & Management*, 34(4), 317–335.
- Indriastuti, D. E. (2016). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi. *InFestasi*, 12(2), 115–130.
- Indriastuti, D. E., Agusdin, & Animah. (2017). Analisis Pengaruh Asimetri Informasi,

- Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *InFestasi*, 12(2), 115. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v12i2.2763>
- Jafar AW, M. (2019). Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal KAPemda - Kajian Administrasi Dan Pemerintah Daerah*, 14(8), 43–58.
- Jaswadi, J., Purnomo, H., & Sumiadji, S. (2022). Financial statement fraud in Indonesia: a longitudinal study of financial misstatement in the pre-and post-establishment of financial services authority. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Liao, J., Smith, D., & Liu, X. (2019). Female CFOs and accounting fraud: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 53, 449–463.
- Lukman, H., & Harun, V. (2018). Faktor yang mempengaruhi deteksi kecurangan dalam persepsi auditor eksternal dan auditor internal. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 255. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.351>
- Malau, E., & Parhusip, P. (2015). Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Food Dan Beverages Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 2(1), 83–106. <https://doi.org/10.54367/jrak.v2i1.175>
- Mangala, D., & Kumari, P. (2017). Auditors' perceptions of the effectiveness of fraud prevention and detection methods. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(2), 118–142. <https://doi.org/10.1177/0974686217738683>
- Manurung, H. T. ., & Hardika, L. A. (2015). Analysis of Factors That Influence Financial Statement Fraud In The Perspective Fraud Triangle: Empirical Study on Banking Companies In Indonesia. *International Conferences on Accounting Studies (ICAS)*, 279–286. <https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2019.2288648>
- Mohammad, W. . (2020). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud (Studi pada DPRD kabupaten Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Muna, B. N., & Haris, L. (2018). Pengaruh pengendalian internal dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 35–44.
- Nazarah, P., & Saleh, M. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Asimetri Informasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 20–30.
- Noviriantini, K., Darmawan, S. A. ., & Werastuti, S. N. . (2015). Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Moralitas Aparat Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.5242>
- Nugraha, K. W., & Wardhani, E. N. K. (2022). The Effect Of Managerial Coaching, Person-Job Fit, And Motivation Toward Employee Performance: The Mediating Role Of Satisfaction And Engagement. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2899–2911.
- Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 273–287. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p273-287>

- Purwanti, A. (2022). Implementation of Good Governance in Local Government Systems in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(2), 482–490.
- Rahman, F. A. A., Suki, N. M., Yusof, M. I. M., & Yusof, R. (2022). Residents' trust in local government councils in an emerging nation: effect of political efficacy, good governance and performance. *Transforming Government: People, Process and Policy*, ahead-of-print.
- Ramadhany, I. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JOM Fekon*, 4(1), 1253–1267.
- Ramos Montesdeoca, M., Sánchez Medina, A. J., & Blázquez Santana, F. (2019). Research topics in accounting fraud in the 21st century: A state of the art. *Sustainability*, 11(6), 1570.
- Rodiah, S., Ardianni, I., & Herlina, A. (2019). Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan budaya organisasi terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 99–109.
- Roszkowska, P. (2020). Fintech in financial reporting and audit for fraud prevention and safeguarding equity investments. *Journal of Accounting & Organizational Change*.
- Rowa, C. W. F., & Arthana, I. K. (2019). Pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 122–137.
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). The effect of quality financial reporting on good governance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), 277.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–8.
- SELA, A. (2021). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, INTEGRITAS DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI). *JUHANPERAK*, 2(2), 258–272.
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2020). Is it suitable for your local governments? A contingency theory-based analysis on the use of internal control in thwarting white-collar crime. *Journal of Financial Crime*.
- Siddiq, F. R., & Hadinata, S. (2016). Fraud Diamond Dalam Financial Statement Fraud. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2692>
- Takalamingan, F. S. (2022). Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 161–188.
- Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. *Jurnal Aspirasi*, 6(1), 63–76.
- Tutu, R. V. B., Areros, W. A., & Rogahang, J. J. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Astra International Daihatsu Tbk Cabang Manado. *Jurnal Productivity*, 3(1), 24–29.

- Wardani, D. K., & Wulandari, V. D. (2022). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE & KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TAX AVOIDANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2020. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(5), 813–826.
- Young, S. D. (2020). Financial statement fraud: motivation, methods, and detection. In *Corporate Fraud Exposed*. Emerald Publishing Limited.
- Zhang, Y., & Xu, L. (2021). Quality incentive contract design in government procurement of public services under dual asymmetric information. *Managerial and Decision Economics*, 42(1), 34–44.